https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah
https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i4.2900

Open Access

SANG PENCERAH
Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton

E-ISSN: 2655-2906, P-ISSN: 2460-5697 Volume 9, No 1, Tahun 2023

Penilaian Performa Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Metode Evaluasi Efektifitas dan Efisiensi

Farid Yusuf Nur Achmad[1*].

[1]Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
[*]Korespondensi: faridyusuf.umb@gmail.com

Info Artikel

Diterima 10 *Desember 2022*

Disetujui 17 *Januari 2023*

Dipublikasikan 09 *Februari 2023*

Keywords: Cashless Food Assistance; Policy Evaluation; Effectiveness; Efficiency.

© 2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY-SA 4.0)

Abstrak

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan wujud dari regulasi pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 merupakan program kebijakan pemerintah yang dilakukan kementerian sosial dan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dengan tujuan menekan beban masyarakat dengan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tulisan ini mengemukakan penilaian performa pelaksanaan kebijakan BPNT berbasis pada teori evaluasi efektifitas dan efisiensi. Penilaian efektifvitas mengacu pada kriteria ketepatan, kecukupan, dan kualitas, sementara efisiensi mengait pada kriteria responsifitas, pemerataan, dan waktu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif desktiptif dengan memanfaatkan instrumen wawancara kepada stakeholder terkait dan KPM. Hasil penelitian menujukkan bahwa efektifitas pelaksanaan program BPNT cukup baik karena program tersebut dinilai mampu untuk meringankan beban pengeluaran pangan sehari-hari. Kurangnya sosialisasi menyebabkan beberapa KPM tidak mengetahui tujuan program tersebut. Daftar KPM perlu pemutakhiran berkala sebagai wujud faktualitas data masih adanya masyarakat yang berhak menerima belum tercakup dalam daftar. Penilaian efisiensi program adalah belum cukup baik karena penyaluran bantuan yang tidak merata dan waktu penyaluran yang tidak jelas bagi masyarakat calon penerima meskipun respon masyarakat sangat baik.

Abstract

The distribution of Non-Cash Food Assistance (BPNT) is a form of government regulation Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 63 of 2017 is a government policy program carried out by the ministry of social affairs and implemented by Regencies/Cities with the aim of reducing the burden on society with the target of Beneficiary Families (KPM). This paper presents an assessment of the performance of BPNT policy implementation based on the theory of evaluation of effectiveness and efficiency. Evaluation of effectiveness refers to the criteria of accuracy, adequacy, and quality, while efficiency relates to the criteria of responsiveness, equity, and time. This study uses descriptive qualitative methods by utilizing interview instruments with relevant stakeholders and KPM. The results of the study show that the effectiveness of the implementation of the BPNT program is quite good because the program is considered capable of lightening the burden of daily food expenditure. The lack of socialization caused some KPM to not know the purpose of the program. The list of beneficiary households needs to be periodically updated as a form of factual data; there are people who are entitled to receive not yet included in the list. The evaluation of the program's efficiency was not good enough because the distribution of aid was uneven and the time for distribution was not clear to potential beneficiary communities, even though the community's response was very good.

1. Pendahuluan

Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan terhadap penyelenggara pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. tugas pemerintah adalah untuk menjamin setiap warga negara kehidupan yang layak atau kehidupan yang bebas dari kemiskinan dan merasakan kesejahteraan (Nurhasan dkk, 2021). Adam Smith membagi dua tugas utama yang berada di bawah lingkup negara. yang Pertama dan terpenting, negara harus memastikan bahwa setiap orang merasa aman warga negaranya dari semua hal macam ancaman apapun. Kedua ekonomi harus didorong dan diciptakan oleh negara untuk warga negaranya. Sementara itu Amartya sen berpendapat negara mempunyai kekuatan untuk bersiasat dengan berbagai instrumen kebijakan di mana program-program pembangunan yang dilakukan negara harus mampu membebaskan masyarakatnya dari himpitan-himpitan kemiskinan (Iskandar, 2021).

Kesejahteraan merupakan Kehidupan yang diimpikan dan diharapkan oleh semua orang di dunia ini. Baik di kota maupun di desa, Setiap orang mendambakan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Tetapi, terkadang proses kehidupan kita jalani tidak sefrta merta dalam kondisi sejahterah. Karena pasang surut kehidupan, orang selalu berusaha untuk tetap sejahtera. Dimulai dengan pekerjaan yang sulit seperti kuli, pemulung dan sebaginya sampai dengan pekerjaan kantoran atau pengusaha dengan gajinya mencapai jutaan yang dilakukan oleh manusia. Apa pun yang legal akan dilakukan untuk kepentingan kehidupan, meskipun itu bertentangan dengan hukum dan terbebas dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks serta selalu menjadi permasalahan utama disetiap negara tidak hanya di indonesia tetapi diseluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Indonesia adalah salah satu negara yang masih taraf berkembang kaya akan sumber daya alam namun, beberapa wilayah di indonesia masih termasuk miskin. Di Indonesia, kemiskinan terjadi akibat berbagai faktor, antara lain kurangnya lowongan pekerjaan yang membuat sulit bagi orang untuk mencari pekerjaan selain memaksakan diri keluar dari kemiskinan beberapa dari masyarakat indonesia memiliki pekerjaan namun gaji yang mereka terima maskih jauh dari kata cukup sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan hidup.

Pemerintah telah berupaya dengan berbagai cara untuk mencegah kemiskinan dengan berbagai upaya, menerbitkan kebijakan tentang pengentasan kemiskinan. Hal tersebut merupakan wujud dari kepedulian pemerintah sebagai bentuk perhatian pemerintyah dalam pengurangan beban masyarakat serta mencukupi kebutuhannya adalah dengan di gelontorkan kebijakan-kebijakan yang sebagai wujud perhatian pemerintah, salah satu kebijakan adalah program Bantuan Pangan Non Tunai BPNT. Dengan target masyarakat miskin di Indonesia yang datanya sudah masuk kedalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang diperuntukkan pada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan target utama yakni keluarga dengan kondisi sosial ekonomi kurang atau sama dengan 25% pada wilayah yang target pelaksanaan. Bantuan tersebut berwujud kartu keluarga sejahtera (KKS) untuk kemudian dapat digunakan sebagai alat untuk berbelanja pada *e-warong*. Kebijakan pemerintah ini sebesar Rp. 200.000 dimana dana tersebut tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang *cash,* namun berbentuk kebutuhan pokok dengan wujud beras dan telur. Upaya ini sebagai wujud

pemerintah untuk mendorong pedagang kaki lima dalam bentuk kios encaran rakyat dan keluarga penerima manfaat (KPM), dari aspek kesehatan tentunya masyarakat tidak hanya mendapatkan asupan karbohidrat akan tetapi protein yang cukup.

Distribusi dari kebijakan BPNT untuk masyarakat di harapkan dapat lebih efisien dan efektif disemua aspek indikator pengukurannya. Kebijakan BPNT merupakan salah satu kebijakan nasional yang diawasi langsung pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia dan secara langsung diberikan tanggung jawab pada tingkat kabupaten atau kota yang memiliki wewenang di daerah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi mengentaskan kemiskinan. Sulawesi Tenggara memiliki dua kota, salah satunya adalah Kota Baubau yang juga menerima mandat dari kementerian sosial dalam melaksanakan kebijakan pemerintah bantuan pangan non tunai (BPNT) indikasinya bahwa penduduk Kota Baubau masih tergolong ekonomi rendah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode desktiptif kualitatif yang memanfaatkan instrumen wawancara langsung kepada stakeholder terkait dan KPM. (Sugiyono, 2015) mengemukakan bahwa dengan memberikan informasi dan data yang dapat dipercaya tentang kondisi di lapangan, penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang subjek penelitian di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Wawancara langsung menggunakan pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada subjek penelitian dilakukan melalui tanya jawab langsung secara tatap muka serta melalui sambungan telepon. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan terlebih dahulu kepada sampel penelitian.

Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling dimana sampel yang menjadi target ditetapkan secara acak dan sengaja oleh peneliti sendiri, dengan maksud memilih sampel yang dipandang lebih tahu serta dengan pertimbangan bahwa kontribusi yang diberikan informan dalam proses pengumpulan data sesuai dengan keinginan, indikator, dan beberapa pertimbangan dalam pelaksanaan penelitian. Secara umum dalam penelitian ini ditetapkan 12 sampel terpilih dimana informan berdomisili di kelurahan Baadia, kecamatan Murhum, kota Baubau sebagai obyek utama dalam penelitian ini dengan spesifikasi sebagai berikut, pengelola BPNT, pengelola usaha *electronic warong*, staf kantor pos, penerima manfaat BPNT dan sekretaris kelurahan, masyarakat miskin.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Penelitian ini mengukur performa kebijakan BPNT menggunakan metode eveluasi efektifitas dan efisiensi dengan mengacu pada teori (William N Dunn, 2002)

Efektifitas

Penilaian efektifvitas mengacu pada kriteria ketepatan, kecukupan, dan kualitas. Ketepatan atau kelayakan (Appropriateness) merupakan variabel yang digunakan dalam melakukan seleksi serta sejumlah alternatif-alternatif yang

kemudian dijadikan rekomendasi dalam menilai apakah hasil dari alternatif-alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan wujud dari tujuan yang layak. Dengan kriteria kelayakan di hubungkan dengan rasionalitas subtantif, hal ini disebabkan karena kriteria ini berhubungan dengan pokok tujuan atau lebih ringkas ketepatan dapat diartikan dengan sebuah pertanyaan "Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?" sebagai uapaya dalam pengungkapan permasalahan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan serta infroman kunci dengan fokus "Apakah sudah tepat sasaran dalam penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) serta Apakah BPNT lebih baik bantuan dalam bentuk beras dan telur atau uang tunai?"Untuk melihat tingkat ketepatan dari kebijakan pemerintah tentang program BPNT pada obyek penelitian untuk itu, penulis memperoleh informasi langsung pada informan dengan cara wawancara kepada Sekretaris kelurahan Baadia ibu Murifa, menjelaskan bahwa:

> "Sasaran dari program ini masyarakat miskin yang berhak untuk mendapatkan bantuan dan tentunya sudah terdaftar pada data terpadu kesejateraan sosial (DTKS) dan sudah ditetapkan langsung oleh kementrian sosial. jadi kalau soal tepat sasaran ini saya rasa sudah cukup tepat khususnya di Kelurahan Baadia ini, karena dari masyarakat sendiri tidak ada keluhan tentang penerima manfaat dari program ini sendiri. Dan menurut saya hasil yang dicapai pasti sangat bermanfaat bagi masyarakat baik itu beras dan telur atau uang tunai." (wawancara informan,10 September 2022, jam 09.50 wita)

Hasil olahan data peneliti terhadap informan dalam bentuk wawancara diatas, dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah BPNT pada obyek penelitian yakni Kelurahan Baadia sudah tepat sasaran, ketepatan tersebut dapat diketahui bahwa seluruh penerima merupakan masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan. Hal yang berbeda dipaparkan oleh informan lain Pendamping Kecamatan murhum program BPNT ibu hariyani menjelaskan bahwa:

> "Saya tidak pungkiri memang masih ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan BPNT, salah satu penyebabnya seperti kemarin itu ada yang belum lama pindah dan kami meninjau langsung memang layak menerima bantuan jadi untuk sekarang ini kami melakukan pendataan kembali guna lebih tepat sasaran untuk kedapannya serta untuk bentuk BPNT ini baik itu uang atau beras dan telur saya kira mayarakat sangat terbantu dengan itu jadi keduanya sama bagusnya" (wawancara informan, 20 September 2022, jam 09.50 wita).

Hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa Program BPNT cukup baik, kendala yang menurut peneliti tidak terlalu penting, terkait beberapa dari masyarakat miskin tidak mendapatkan BPNT dalam kasus ini tentunya beberapa indikator yang dapat dijadikan rujukan salah satunya kesalahan dari pendata lapangan yang kurang memahami prioritas serta tidak adanya validasi data lama ke data baru. Permasalahan tersebut di ungkap oleh salah satu KPM dengan inisial WM yang menyampaikan bahwa:

> "Penerima bantuan ini yang saya lihat dilingkungan sekitar rumah memang mereka yang miskin jadi menurut saya sudah cukup tepat sasaran walaupun ada beberapa yang miskin tetapi tidak mendapat bantuan dan untuk bentuk

bantuan buat saya, baik beras atau uang tunai sama saja yang penting saya mendapatkan bantuan tersebut karena dalam bentuk uang juga pasti untuk dibelikan juga beras dan lainnya" (wawancara informan,11 September 2022, jam 09.50 wita).

Hasil wawancara informan diatas diketahui bahwa secara umum sudah cukup tepat sasaran. Hal yang sama juga di kemukakan salah satu penerima program, yang berinisian RM mengemukakan bahwa:

"iya sudah tepat sasaran lihat saja kondisi kami ini dan telur atau uang tunai menurut saya yang paling bagus itu beras, karena beras untuk kebutuhan pokok tetapi kalau dalam bentuk uang itu uangnya bisa saja digunakan untuk kebutuhan lain yang kurang bermanfaat" (wawancara informan, 10 September 2022, Jam 08. 30 wita).

Hasil wawancara informan diatas diketahui bahwa ketepatan yang dirasakan KPM bagus dengan adanya BPNT dapat dilihat dari kepuasan yang di terima baik itu dalam bentuk uang tunai ataupun beras dan telur. Disisi lain menurut informan pengelolah *e-warong* termasuk dalam program BPNT ibu Wa ambe sepakat dengan pernyataan informan inisial RM mengemukakan bahwa :

"Pada dasarnya program ini cukup efektif beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain pendamping BPNT ini dalam bentuk kebutuhan pokok beras dan telur, kemudian penyalurannya melalui *e-warong* tentunya imbasnya sangat membantu meringankan beban masyarakat, bantuan berupa kebutuhan pokok beras dan telur ini menjadikan masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya, ditambah lagi gesaran bantuan tiap tahunnya bertambah, sebagai contoh pada tahun 2020 besaran bantuannya Rp 110.000, tahun berikutnya naik menjadi Rp 150.000 dan tahun 2022 menjadi Rp 200.000 tentunya dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini sangat membantu, meringankan beban hidup, yah disatu sisi ada juga beberapa bantuan lain yang tentunya bertujuan membantu masyarakat miskin dengan sendirinya beban pengeluaran masyarakat kecil" (wawancara informan, 20 September 2022, Jam 10.50 wita)

Hasil wawancara menjelkaskan implementasi kebijakan Program BPNT, pada semua unsur yang terlibat sudah efektif dalam penyampaian informasi bantuan BPNT kepada KPM.

Efisiensi

Penilaian efisiensi mengait pada kriteria pemerataan, responsifitas, dan waktu. Pemerataan dalam kebijakan publik adalah kebijakan yang usahanya didistribusikan secara adil. Kriteria pemerataan harus dapat menjawab pertanyaan tentang "Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferansi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?" Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan para informan dengan fokus "Apakah penerima manfaat BPNT sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku? Serta Apakah bantuan pangan non tunai (BPNT) ini telah merata untuk masyarakat miskin di kelurahan Baadia?". Menjawab hal itu, tanggapan informan pada indikator penelitian dilapangan tentang kebijakan pemerintajh (BPNT) ini dapat mereduksi persoalan kesenjangan sosial masyarakat, hal tersebut secara tegas dipaparkan oleh ibu Hariani

merupakan petugas Pendamping BPNT untuk wilayah kecamatan Murhum, menjelaskan bahwa:

> "Sekarang ini kami turun langsung di masyarakat melihat kondisi rumah dan yang lain berdasarkan kriteria yang memang layak menerima bantuan jadi kedepanya kami pastikan untuk penerima manfaat BPNT sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku dan mengenai meratanya untuk seluruh warga miskin di kelurahan Baadia Saya tidak pungkiri memamang Masih ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan BPNT, salah satu penyebabnya seperti kemarin itu ada yang belum lama pindah dan kami meninjau langsung memang layak menerima bantuan jadi ini kami melakukan pendataan kembali" (wawancara informan, 20 September 2022, Jam 10.10 wita)

Hasil wawancara sebagaimana dipaparkan diatas terkait pemerataan dari program BPNT. Sudah terimplementasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, disisi lain sebagai wujud pemerataam bagi masyarakat dengan indeks keluarga miskin belum sepenuhnya merata dengan, tentunya ada beberapa faktor yang menjadi hambatan, wujud dari upaya penyempurnaan program tersebut sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah pihak pengelola BPNT sedang danterus melakukan pemutahiran data, terkait jumlah penduduk miskin sesuai dengan kreiteria yang berlaku. Ungkapan tersebut juga dibenarkan oleh sekretaris kelurahan. ibu Murifa, bahwa:

> "Kalau yang kami lihat ini memang yang penerima BPNT sudah tepat kepada mereka yang kurang mampu dalam mengurangi Kesenjangan Sosial dimasyarakat sebab dengan pemberian ini msyarakat yang menerima bantuan ini sedikitnya sudah membantu didalam memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari. Secara umum sudah tepat sasaran sesuai Kriteria yang berlaku. Walaupun secara khususnya masih ada 1 atau 2 keluarga yang berhak menerima bantuan tersebut tetapi karena kuota yang terbatas maka masih ada yang tidak menerima bantuan tersebut." (wawancara informan, 20 September 2022, jam 10.50 wita)

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh masyarakat penerima manfaat kebijakan program inisial SM menjelaskan bahwa:

> "Untuk kriteria yang pasti yang menerima bantuan itu orang miskin, di lingkungan sekitar tempat tinggal saya ini yang terima bantuan tersebut semuanya masyarakat yang memang miskin dan saya lihat sudah sesuai. Merata pasti belum karena ada beberapa tetangga saya yang memang bisa dikatakan miskin tapi tidak mendapatkan BPNT ini" (wawancara informan, 9 September 2022, Jam 11.00 wita.)

Hal serupa juga dipaparkan oleh masyarakat penerima manfaat lainnya yang berinisial WN, menjelaskan bahwa:

> "Saya lihat memang sudah benar yang menerima itu semua warga miskin dan untuk merata semua itu pasti sebagian belum karena banyak yang mengelu tapikan kelurahan atau pihak dinas sosial yang menilai layak dan tidaknya dan ada juga memang miskin tapi karena data-datanya tidak lengkap seperti tidak ada kartu keluarganya, tidak ada kartu nikahnya sehingga tidak dapat bantuan" (Wawancara, 10 September 2022, Jam 10.15 Wita).

Respon masyarakat sangat baik terhadap program BPNT. Hal ini terlihat dari pendapat yang diungkapkan oleh pengelola *e-warong* ibu Suriati yang mengatakan bahwa:

> "Bagus, maksudnya mereka sangat senang dengan adanya BPNT ini dimana setiap bulannya mereka datang mengecek bantuan apakah sudah ada atau belum dan mereka lebih senang BPNT itu dalam bentuk beras. tetapi kalau masalah kepuasan tergantung masyarakat, komplain pasti ada karena mindset orang berbeda- beda ada yang merasa puas dengan kualitas beras dan telur. sampai saat ini tidak ada komplain dari masyarakat." (wawancara informan, 20 September 2022, Jam 09.50 wita).

Selain pernyataan informan tadi, ungkapan lain juga diberikan masyarakat penerima manfaat BPNT inisial WH saat dikonfirmasi melalui wawancara mendalam penulis menjelaskan bahwa:

> "Terkait data penerima, tahun lalu pernah ada nama saya tapi tidak dapat karena di tempat penerimaan bantuan (*e-warong*) tidak ada namaku (saldo nol) maka dari itu saya bertanya sama pihak lurahan bagaimana solusinya dan disuruh nanti tunggu tahun depan karena itu kesalahan dari pusat dan sekarang sudah terima BPNT tersebut tentunya kita syukuri ada bantuan selalu saya terima beras atau uang tunai bila datang itu bantuan saya merasa terbantu" (wawancara informan, 10 September 2022, Jam 09.50 wita).

Dari wawancara diatas diketahui bahwa respon KPM bagus dengan Program BPNT tetapi kurang adanya masukan-masukan serta kritik-kritik tentang kebijkan pemerintah tentang program BPNT dengan target KPM kepada lembaga terkait. Dari beberapa penjelasan hasil wawancara yang telah di ungkapkan Diatas dapat disimpulkan Kurangnya kedekatan pemberi layanan dalam hal ini pendamping lapangan program BPNT kepada KPM dalam hal sosialisasi program.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, BPNT adalah bantuan sosial dalam bentuk pangan yang penyalurannya diwujudkan *non tunai* oleh pemerintah yang diberikan untuk masyarakat pada (KPM) dengan durasi waktu sebulan dengan perwujudannya *uang elektronik* dengan dan hanya dapat digunakan sebagai alat tukar menukar digital dalam pembelian kebutuhan bahan pokok berupa pangan pada pedagang penerima manfaat dengan aplikasi *e-warong* dengan pihak Bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam bentuk kerjasama. Berdasarkan pemapararan diatas peneliti menggeneralisasikan dalam bentuk simpulan dengan dukungan validasi kesesuaian antara data dilapangan dengan keterangan informan maka hasil akhir tentunya kredibel.

Hasil penelitian dengan pendekatan teori evaluasi William Dunn bahwa evaluasi kebijakan merupakan bagian dari tahapan penting suatu penilaian terhadap sebuah kebijakan, apakah kebijakan tersebut dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya ataukah dapat menimbulkan efek sebaliknya. Berdasalkan hasil analisis data dengan pendekatan-pendekatan kualitatif deskripsi terkait evaluasi kebijakan pemerintah tentang program (BPNT) terhadap obyek penelitian di Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau:

Bahwa *effectiveness* (efektivitas) mengenai apakah sebuah alternatif berhasil (memiliki efek yang diinginkan) atau apakah tujuan tercapai sebelum tindakan dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, dokumentasi serta observasi, disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terkait program BPNT pada kelurahan Baadia yang merupakan wilayah Kecamatan Murhum di Kota Baubau sudah baik terhadap indikator pencapaian tujuannya yakni meringankan pengeluaran keluarga berstatus miskin. Beberapa hal yang menjadi fokus peneliti terkait kebijakan BPNT di Kota Baubau ini belum cukup efektif, beberapa alasan yang dapat peneliti kemukakan antara lain masih ada masyarakat yang berhak mendapatkan sentuhan kebijakan pemerintah program BPNT ini namun mereka justru tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut secara otomatis angka kemiskinan bertambahnya pada kelurahan Baadia yang merupakan obyek dalam penelitian ini, hal tersebut juga mempengaruhi jumlah KPM dimana dari tahun 2021 berjumlah 152 KK naik menjadi 209 KK di tahun 2022. Kendatipun jumlah yang bertambah tidak begitu tinggi, namun ini merupakan wujud dari ketidak berhasilan dari kebijakan pemerintah Program BPNT di kelurahan Baadia kecamatan Murhum kota Baubau belum cukup efektif dalam menekan angka kemiskinan.

Kecukupan (adequacy) yaitu mengenai sejauh mana tingkat efektivitas memenuhi persyaratan, nilai, atau peluang untuk pemecahan masalah. berdasarkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemeirntah tentang program (BPNT) pada kelurahan Baadia kecamatan Murhum kota Baubau dengan indikator Kecukupan pada dasarnya sudah cukup baik ini dibuktikan dengan adanya kebijakan pemerintah program (BPNT) yang awalnya sebesar Rp.110.000 dan kemudian bertambah Rp. 200.000 ditahun 2002 setiap bulan tentunya program ini sangat meringankan masyarakat penerima bantuan, dengan bantuan ini tentunya membantu mencukupi kebutuhan makan sehari-harinya. Berdasarkan temuan dilapangan oleh peneliti diketahui bahwa, jumlah bantuan dalam bentuk beras yang didistribusikan kepada masyarakat itu beras 14 kg, 1 raktelur/ KPM/ bulan, jumlah beras tersebut tentunya tidak mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga masyarakat penerima bantuan. Namun disisi lain, kebijakan pemeirntah terkait program BPNT ini sudah dapat dikatakan cukup tepat dalam upaya membantu meringakan beban masyarakat.

Ketepatan (appropriateness) yaitu dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasi tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Berdasarkan hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan belum cukup tepat sasaran, hal ini karena ada beberapa masyarakat juga yang merasa berhak tetapi tidak terdaftar dalam KPM, maupun masyarakat yang sudah tidak berdomisili di kelurahan tersebut tetapi tetap terdaftar dalam KPM. Permasalahan ini disebabkan karena data yang ada di Pusat tidak ter *update*/tidak ada pembahuran data ini berimbas langsung pada penerima manfaat adanya penerima manfaat yang memeiliki tingkat ekonomi sudah layak namun masih menerima bantuan, tentunya hal ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan, serta dapaty berimbas pada menurunya angka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal kebijakan-kebijakan lainnya yang akan dan sedang digulirkan banyaknya data yang tidak tervalidasi dengan cermat hakikatnya dalam konteks administrasi dapat dikatakan

sebagai mal administrasi, tentunya menyikapi persoalan ini pemerintah harus tegas.

Hasil penelitian dari aspek kualitas disimpulkan cukup baik dalam hal kualitas BPNT dibuktikan dengan jumlah responden yang berpendapat puas dari aspek kualitas beras yang diterima. Aspek kuantiti serta perwujudan BPNT yaitu beras atau uang dalam bentuk tunai, dapat disimpulkan bahwa KPM sebagai obyek pengguna layanan sangat terbantukan sebagai wujud pengurangan alokasi dana kendati dari segi jumlah tentunya belum mencukupi jika pemenuhan kebutuhan sehari. Tentunya aspek interpretasi antara kebutuhan masyarakat dengan program kebijakan pemerintahan program BPNT sebagai asas kausal permasalahan masyarakat terpenuhi.

Pendekatan dengan indikator *effeciency* (efisiensi) secara khusus fokus dalam penelitian ini adalah kuantiti dari aktifitas yang menjadi prioritas dalam mencapai tingkat efisiensi tertentu. Kebijakan efisiensi adalah kebijakan yang mengurangi biaya sambil memaksimalkan efektivitas. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa kurang efisien sebab KMP belum memahami mengenai BPNT ini, sebagian masyarakat hanya mengetahui bahwa program ini sebatas Bantuan Sosial berupa beras atau uang tunai saja yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk masyarakat berkategori miskin tanpa mengetahui tujuan dari program bantuan tersebut. Gambaran ini tentunya menjelaskan kepada kita bahwa rendahnya upaya pemerintah dalam pemberian pemahaman awal dalam bentuk sosialisasi pada masyarakat terkait kebijakan BPNT ini, serta terkait validasi data penerima bantuan program BPNT yang tidak diperbaharui, hal ini berdampak pada penerima manfaat, hasil identifikasi data pada obyek penelitian di ketahui bahwa dari total data yang ada beberapa dari data penerima manfaat sudah pindah domisili, meninggal dunia, dan masyarakat yang terkategorikan masyarakat mampu namun masih terdaftar sebagai KPM.

Pemerataan (equity) menunjuk pada suatu program tertentu dapat efektif apabila biaya manfaat merata dan didistribusikan secara adil. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat disimpulkan mengenai evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kelurahan Baadia kecamatan Murhum kota Baubau berdasarkan indikator Pemerataan menurut teori William Dunn sudah merata dan sudah sesuai dengan Kriteria yang berlaku secara umum. Namun jika secara rinci tentunya masih ada beberapa permasalahan antara lain masyarakat yang seharusnya menerima BPNT namun tidak termasuk kedalam daftar sebagai KPM. Permasalahan ini terjadi karena data terrekam atau tersimpan sebagai rujukan di Pusat tidak termutahirkan atau tidak terubah secara terus menerus sehingga tidak singkronnya data penerima dengan kondisi eksisting masyarakat penerima saat ini.

Responsiveness (*responsivitas*) dapat diukur melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat dikatakan bahwa sangat berhasil, terbukti dengan tanggapan positif masyarakat terhadap program ini. Suatu program dianggap berhasil bila mendapat umpan balik positif dari masyarakat. Peneliti melihat bahwa masyarakat merasa antusias sekali terhadap program BPNT ini, penulis amati melalui respon

masyarakat ketika datang ke E-warong atau kantor pos untuk bertanya kapan beras atau uang BPNT disalurkan dan juga mengenai kualitas beras yang didistribusikan kepada masyarakat sejauh yang penulis lihat semakin membaik sehingga dengan adanya Program BPNT ini dapat sekurang-kurangnya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pengadaan beras.

Waktu yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efisensi dari segi ketepatan waktu maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya kejelasan yang di berikan oleh pemerintah mengenai waktu penyaluran bantuan sehingga membuat keluarga penerima manfaat bertanya-tanya yang tadinya berdasarkan pedoman BPNT penyaluran dilakukan tiap bulannya tetapi yang ada di lapangan tidak seperti itu.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektifitas pelaksanaan program BPNT adalah cukup baik karena program tersebut dinilai mampu untuk meringankan beban pengeluaran pangan sehari-hari. Kurangnya sosialisasi pemerintah menyebabkan masih banyak keluarga miskin yang tidak mengetahui tujuan pelaksanaan program tersebut. Daftar KPM perlu pemutakhiran berkala yang lebih faktual karena beberapa masyarakat yang berhak menerima belum tercakup dalam daftar KPM. Selain itu, penilaian efisiensi pelaksanaan program adalah belum cukup baik karena penyaluran bantuan yang tidak merata dan waktu penyaluran yang tidak cukup jelas bagi masyarakat calon penerima meskipun respon masyarakat sangat baik.

5. Ucapan Terima Kasih

Kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammdiyah Buton, yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini. Masyarakat dan aparat Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, yang telah bekerjasama dalam memberikan keterangan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Serta, rekan-Rekan dari Lembaga Mahandia Research Center dan Lembaga Bebas Research Center, Kota Baubau yang telah banyak membantu peneliti sebagai rekan kerja dalam pengolahan data dan informasi dilapangan

Daftar Pustaka

Adiwilaga, R., Widiyaningrum, W. Y., & Hasanah, D. I. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Oleh Dinas Sosial Di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 46(2), 1–12. https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1368

Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. Jurnal Respon Publik, 14(3), 1–7. http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/download/7913/6463

BPS. (2021). Kota baubau dalam angka. In Badan Pusat Statistik Kota Baubau,, Katalog: 1102002.7472. https://baubaukota.bps.go.id/publication/2021/02/26/360ae5ab09344c96e47233ee/kota-baubau-dalam-angka-2021.html

Iskandar, A. M. (2021). Negara Dan Politik Kesejahteraan. Gramedia pustaka utama.

Khothimah, K., & Hertati, D. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Surabaya (Studi pada Kecamatan Tambaksari). Jurnal Governansi, 7(2), 1–12. https://doi.org/10.30997/jgs.v7i2.4230

Kusudur, A., & Prabawati, I. (2020). Evaluasi Program Bantuan Beras Miskin Daerah (Raskinda) Dengan Model E-Voucher Di Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten …. Publika, 6(1), 1–8. https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/32635

Laloan, I. A. (2020). Evaluasi Proses Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai di Kecamatan Tomohon Selatan. Jurnal Administro, 2(2), 1–6. https://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/administro/article/download/1681/747

Laurentcia, S., & Yusran, R. (2021). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Journal of Civic Education, 4(1), 1–11. https://doi.org/10.24036/jce.v4i1.433

M. Hidayat Panuntun Muslim. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(1), 1–9. http://jmiap.ppj.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/19

Nurhasan, R., Kusrin, & Purnamasari, H. (2021). Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Program E-Waroeng Kepada Masyarakatdesa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 7(8), 1–10. https://doi.org/10.5281/zenodo.5763945

Peraturan Mentri Sosial Reptblik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai. In Mentri Sosial Reptblik Indonesia (Pp. 1–33). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/120363/Permensos Nomor 20 Tahun 2019.Pdf

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Issue 156, Pp. 1–56).

Reza Widjaja, A. (2019). Perumusan Indikator Kemiskinan dan Pengukuran Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Pagedangan Ilir, Kronjo, Tangerang. Management, and Industry (JEMI), 2(3), 1–13.

Safitri, I. F., Mubarok, M., & Hudallah. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Di Dusun Wedegan Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Bojonegoro). NiCMa: National Conference Multidisplinary, 1(1), 1–11. http://ejournal.undar.ac.id/index.php/nicma/article/download/369/268

Siyoto, S., & Sodiq, m. ali. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing.

Sugiarto, E. (2015). Menyusun Proposal Kualitatif: Skripsi dan Tesis. suaka media.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Manajemen. Alfabeta.

Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. (2020). Pedoman Umum Program Sembako 2020. Journal of Chemical Information and Modeling, 1(2), 1–182. https://kemensos.go.id/pedoman-umum-program-sembako-2020

Dunn.N.W. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Gadjah Mada Universiti Press. Yogyakarta.

Winarta, W. T., Agung Gede Raka, A., & Made Sumada, I. (2020). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5(1), 1–15. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/1906/1476